

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Departemen Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Departemen Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Departemen Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan "terbentuknya" 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI). Suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu

naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Ditjen PBN sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta 30 Kantor Wilayah Ditjen PBN dan sejumlah KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur jenderal perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

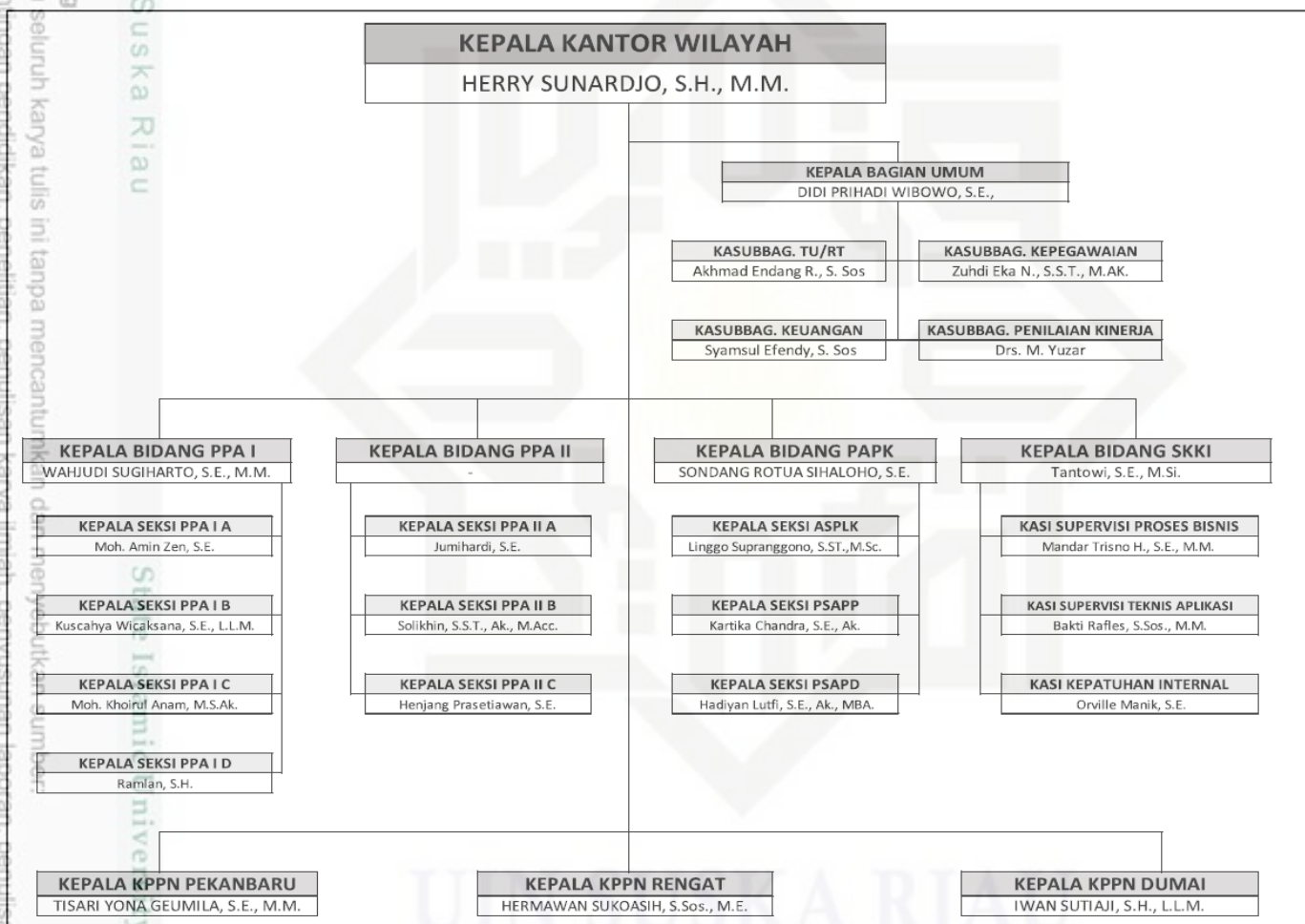
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi baru tersebut. Telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran dibawahnya

GAMBAR 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU**



2.1. Visi Dan Misi Perusahaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Adapun visi dan misi kantor ditjen perbendaharaan provinsi riau sebagai berikut :

Visi

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam proses mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera”.

Misi

- a. Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efesien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan rasa keadilan dan keputusan.
- b. Mewujudkan pengelola kas negara yang efesien, efektif, transparan, dan akuntabel
- c. Menghasilkan pelayanan dibidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat.
- d. Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah yang dananya bersumber dari dalam dan luar negeri dan kredit program secara profesional,berkelanjutan dan akuntabel.
- e. Mewujudkan penyajian informasi dan akuntansi keuangan negara dalam rangka menghasilkan pertanggungjawaban bmn yang akuntabel,transparan, tepat dan akurat.

a. Core Values (budaya dikantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

Budaya dikantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPBN) adalah setiap management di kantor DJPBN Provinsi Riau memiliki budaya yang harus dimiliki oleh setiap individu yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Komitmen**

Kami memberikan komitmen dan partisipasi 100% untuk melaksanakan amanah, memberikan yang terbaik dan komitmen melaksanakan tugas-tugas perusahaan untuk meraih keberhasilan pada kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun.

2. **Amanah**

kami adalah pribadi, organisasi dan kelompok jujur dan bertanggung jawab

3. **Mental positif**

Kami akan selalu mengedepankan sikap dan pola pikir positif, disertai dengan pola optimisme dan keyakinan dan bahwasanya selalu ada hikmah dalam setiap usaha yang dilaksanakan. Sehingga, kami akan selalu berjuang tanpa ada rasa takut dan kegagalan.

4. **Integrated**

Keselarsan dalam halucapan dan perbuatan kami mewujudkan melalui bukti, disertai dengan pelayanan yang optimal dengan menjunjung tinggi kejujuran.

5. **Sehat**

Kami adalah insan-insan yang sehat jasmani dan rohani, senantiasa menjaga semangat dan antusiasme dalam mencapai kinerja terbaik. Mengedepankan pikiran dan akal sehat, serta konsisten menjalani hubungan yang sehat dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun.

6. **Energik**

Kami bekerja cepat dan tuntas untuk membantu satker (satuan kerja), demi meraih hasil yang telah direncanakan dengan efektifitas dan efisiensi tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Handal

Kami adalah pribadi dan kelompok yang dapat diandalkan dalam kinerja dan pencapaian sukses masa depan.

8. Apresiasif

kami saling terbuka dan menghargai satu sama lain, saling membantu untuk saling bersama-sama mencapai hasil terbaik yang telah ditentukan.

9. Taqwa

Kami adalah insan-insan senantiasa Bertaqwa kepada Allah SWT, dengan terus menerus menumpuk keimanan agar senantiasa dapat menjalankan segala perintah-nya dan menjauhi larangan-nya

10. Inovatif

Kami senantiasa menggali ide dan gagasan terbaru agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mencapai hasil maksimal.

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

a. Tugas

Adapun tugas dari kantor ditjen perbendaharaan provinsi riau sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan bidang evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, penelaahan dan pengesahan dokumen melaksanakan anggaran, serta mentoring, evaluasi dan koordinasi di bidang penyerapan pada anggaran berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal
2. Menyiapkan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Menyipakan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, melaksanakan penerusan, peyaluran, penatausahaan pinjaman dan pemantauan, perumuan persetujuan re-strukturisasi /hapus buku/hapus tagih, serta pelaksanaan penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri serta kredit program.
4. Menangani pengaturan kelembagaan dan penyediaan dana, penyaluran dana, perencanaan dan evaluasi, hukum dan pengawasan, dan penatausahaan dan pelaporan dana investasi.
5. Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem perbendaharaan, sistem informasi pengelolaan, basis data, serta penerapan dan dukungan teknologi informasi.

b. Fungsi

Direktorat Jenderal perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Uraian Tugas (*job DekriptionI*)

A. Tugas Sakreteriat Direktorat Jenderal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelayan prima

Sasaran strategis ini dicapai dengan merumuskan dan menciptakan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Salah satunya adalah dengan mengoprasikan layanan Mobile dan layanan Filial di KPPN. Secara Keorganisasian, penyempurnaan Organisasi dari tataran stuktur akan selalu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan internal maupun pemangku kepentingan. Begitu pula dalam hal tatakelola keorganisasian dan alur proses bisnis akan senantiasa dikaji dan disempurnakan secara berkelanjutan. Disamping itu, fungsi-fungsi kehumasan dan *legal affairs* akan semakin ditingkatkan. Peningkatan kehumasan agar berbagai kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh ditjen perbendaharaan dapat lebih *terpublish* demikian juga kebutuhan informasi mengenai data-data terkait bidang keuangan yang menjadi tugas dan fungsi ditjen perbendahaarn dapat dipenuhi. Sedangkan peningkatan fungsi *legal affairs* ditunjukan untuk menyediakan media konsultasi dan bantuan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih intensif.

B. Tugas Pelaksanaan Anggaran

a. Pelaksanaan belanja negara yang optimal

Dalam fungsi pelaksanaan anggaran, sasaran utamanya adalah pelaksanaan belanja negara yang optimal melalui penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIVA sesuai *performance based budgeting* dan MTEF. Disiplin pelaksanaan anggaran akan ditingkatkan melalui peningkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas rencana penarikan dana yang dilakukan melalui penyempurnaan peraturan serta monitoring dan evaluasi tingkat penyerapan anggaran. Perkembangan yang berkesinambungan dibidang pelaksanaan anggaran akan diupayakan untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja. Untuk menyempurnakan manajemen pelaksanaan anggaran, langkah strategi yang akan dilakukan adalah menhajaga konsistensi pencairan dana yang tepat waktu, penyelarasan perencanaan kas dengan otorisasi RPD dan rencana penerimaan pada DIVA, mendukung sistem pencairan dana anggaran dengan sistem TSA, memodernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi, mensosialisasikan kepatuhan, kecepatan, ketepatan, dan transparansi terhadap prosedur barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Tugas Pengelolaan Kas Negara

a. Pengelolaan kas negara yang optimal

Fungsi kas pengelolaan kas mempunyai sasaran untuk mengoptimalkan kas pemerintah dan mengurangi *of fund* yang ditanggung pemerintah akibat selisih antara besaran bunga utang yang dibayarkan dengan besaran yang diperoleh pemerintah, dengan melakukan :

1. Pengelolaan kas negara yang profesional, akuntabel dan transparan sesuai *international best practice* dan dikelola oleh tenaga yang kompeten dibidang keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka Optimalisasi perencanaan kas dengan memperhatikan kemampuan penyediaan kas oleh pemerintah melalui pelaksanaan pinjaman dari dalam/luar negeri.
3. Perbaiki *bussines process* yang terintegrasi dengan membentuk suatu sistem yang menngintegarsikan seluruh pencatatan dan pelaporan yang selama ini terpisah-pisah, sehingga mampu menghasilkan laporan manajerial dalam rangka pengambilan keputusan.

Sesuai dengan peraturan perintah No.39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara dan PMK Nomor 03/PMK.05/2010 Tentang

1. Penyempurnaan *boundarris* dan Redefinsi BLU sesuai *best practice*, yang tepat diterapkan di indonesia.
2. Penyempurnaan regulasi dan tata kelola pengelolaa keunagan BLU antara lain mengenai regulasi perpajakan karena BLU adalah institusi non-profit, tetapi menghasilkan frofit sehingga perlu menyesuaikan aturan perpajakan, serta penetapan alat-alat analitikal serta rasio-rasio keunagan yang akurat, akuntabel, dan transparan.

D. Tugas Akuntansi Dan Pelaporan Keungan

- a. Pengelolaan keunagan yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dicapai dengan :

1. Penyelesaian LKPP (*unaudited*) secara tepat waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peningkatan kualitas laporan keunagn pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keunagan kementrian negara/lembaga (LKKL)

c. Tugas Sistem Perbendaharaan

- a. Penerapan sistem perbendahraan yang handal dan modren

Sasaran strategis ini dicapai dengan :

1. Meningkatkan proses harmonisasi dan sikronisasi perturana dan pengembangan proses bisnis untuk mendukung terciptanya sistem perbendaharaan yang terintegarsi

- b. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Sasaran strategis ini dicapai dengan melakukan penyediaan sistem perbendaharaan yang handal dalam melakukan perbaikan layanan dalam memenuhi janji layanan secara konsisten dan responsif atas kebutuhan penggunaan layanan. Survei kepuasan pelanggan/*stakeholder* diprogramkan secara terjadwal dalam rangka membantu proses penyempurnaa yang senantiasa berlansung di tubuh Ditjen Perbendaharaan.

d. Tugas Transformasi Perbendaharaan

- a. Pembangunan Teknologi dan Informasi Komunikasi yang Terintegarsi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan :

1. Membangun sistem database yang terintegarsi pada KPPN, Kanwil, dan kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
2. Menyusun rancangan aplikasi dan implementasi program SPAN secara penuh, terkait *business process imrovement* dan teknologi informasi.

3. Menyiapkan *hardware* TI yang sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan untuk mendukung SPAN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.